

BAB I

PENDAHULUAN

Jerman mengalami beberapa retakan historis dalam perjalanan sejarahnya terkait *multikulturalisme* dan kelompok minoritas, terutama pada era Nazi. Tetapi, runtuhnya tembok Berlin menjadikan Jerman negara dengan peningkatan signifikan dalam arus imigrasi dibandingkan Italia dan Perancis.¹ Kemudian, secara perlahan kelompok imigran yang berkembang di Jerman menjadi suatu perhatian khusus bagi struktur sosial di Jerman hingga menimbulkan beberapa keresahan dari pemerintah Jerman dan pribumi Jerman. Kondisi tersebut menjadi suatu bahasan menarik dan menimbulkan problematika dimana arus migrasi terkendali di Jerman dan keresahan tersebut ditelaah lebih lanjut dengan konsep dan metodologi serta dasar-dasar penelitian secara rinci dalam bab ini, sebagai berikut:

A. Latar Belakang Masalah

Jerman merupakan salah satu negara berpengaruh di dunia internasional sejak Perang Dunia I. Jerman terlibat aktif dalam Perang Dunia I dan II. Jerman adalah salah satu negara yang sangat terkenal dengan ideologi Fasisme yang sangat kuat pada masa kepemimpinan Adolf Hitler. Ideologi tersebut yang menjadi pembangkit dan kekuatan Jerman setelah Perang Dunia I. Fasisme Jerman adalah semangat *chauvinisme* bangsa Jerman sebagai bangsa keturunan ras *Arya* yang dikenal agung dan mulia, berbeda dengan bangsa

¹ Migrationpolicy.org, *International migrants by country of destination, 1960-2013*, diakses 17 Maret 2015 pukul 03.08 dari: <http://migrationpolicy.org/programs/data-hub/charts/international-migrants-country-destination-1960-2013?width=1000&height=850&iframe=true>

lainnya yang dianggap sebagai keturunan primitif.² Melalui ideologi Fasisime tersebut, Hitler membangkitkan Jerman dan menguasai Jerman dengan tangan besinya. Kekuasaan yang berpusat penuh pada Hitler membangkitkan Jerman dari kekalahan Perang Dunia I serta menimbulkan kebencian bagi negara-negara sekutu pemenang Perang Dunia I.

Fasisme juga menjadi pemicu bagi Jerman dalam memulai Perang Dunia Kedua yang pada akhirnya memisahkan Jerman menjadi dua yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Selain itu, fasisme juga menyebabkan penyingkiran kaum yang mereka sebut *Lebensunwertes Leben* yaitu diantaranya adalah orang Yahudi, Orang Slavia, Orang Rom, dan Homoseksual.³ Tetapi kekuatan Jerman yang dipimpin oleh Hitler akhirnya mulai runtuh akibat kekalahan Jerman yang terulang kembali pada Perang Dunia kedua. Dimana Jerman juga harus terbagi dua yang berdasarkan kekuasaan yang berbeda yaitu di Jerman Timur dikuasai oleh Uni Soviet dan Jerman Barat oleh Amerika Serikat. Pembagian kekuasaan tersebut juga dilatarbelakangi oleh perbedaan ideologis dari Jerman Timur dan Jerman Barat serta menjadi tanda mulai runtuhnya kekuatan ideologi fasisme di Jerman.

Pada Tahun 1989 dengan runtuhnya tembok Berlin menandakan bahwa berakhirnya perdebatan ideologi yang memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur menjadi satu dengan menerapkan sistem pemerintahan federal parlementer. Runtuhnya tembok Berlin juga menjadi awal keterbukaan Jerman dengan dunia luar, yang menjadikan Jerman menjadi negara yang lebih

² Ibad, Faizul., 2013. *Pemikiran Politik Barat*. Makalah. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, hal 12

³ *Ibid*

demokratis. Penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur mengakibatkan peningkatan arus imigrasi di Jerman. Pada awalnya, Jerman merupakan negara penerima “*pekerja tamu*” (Immigrant Worker), kemudian menjadi negara dengan arus imigrasi terkendali. Di tahun 1960, Jerman Barat telah membangun kerjasama bilateral dengan beberapa negara seperti Italia, Maroko, Turki, Tunisia, dan Yugoslavia untuk merekrut pekerja luar sebagai tambahan pekerja di Jerman Barat dengan tenaga terampil sederhana dan upah rendah.⁴ Sebagian besar pendatang yang dinamakan “*pekerja tamu*” pada waktu itu telah kembali ke negara-negara asal mereka di Eropa Selatan atau Tenggara, namun tidak sedikit yang menetap di Jerman. Banyak di antara migran Turki yang datang kemudian menetap pula.⁵ Oleh karena itu, Jerman merupakan salah satu negara di kawasan Eropa Barat yang menerima banyak imigran untuk membantu perkembangan industrialisasi di Jerman pasca perang.⁶

Pada akhirnya, tahun 1980-an jumlah imigran di Jerman meningkat tajam sehingga dibutuhkan suatu kebijakan integrasi antara masyarakat pribumi Jerman dengan kelompok imigran. Jumlah imigran yang meningkat tajam disebabkan Eropa (khususnya Eropa Barat) dikenal sebagai wilayah yang dinamis dengan derasnya aliran uang, barang, jasa dan informasi dari dan ke Eropa yang menjadikannya indikator tingginya tingkat kesejahteraan ekonomi

⁴ *History of the Guest Workers-Immigration of Foreign Workers*. Diunduh, 12 Oktober 2014 pukul 18.47, dari: http://www.germany.info/Vertretung/usa/en/04_W_t_G/02/03/Feature_3.html

⁵ *Fakta mengenai Jerman-Migrasi dan Integrasi*, diakses 11 Oktober 2014 pukul 16.10 WIB, dari <http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/id/masyarakat/main-content-08/migrasi-dan-integrasi.html>

⁶ Ahmad Muhammad, *Globalisasi dan Migrasi: Problematika Integrasi Imigran Turki ke dalam masyarakat Jerman*, November 2012, diakses 06 November 2014, dari: http://ahmad_m-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-67268-Umum-Globalisasi%20dan%20Migrasi:%20Problematika%20Integrasi%20Imigran%20Turki%20ke%20dalam%20Masyarakat%20Jerman.html

Eropa (Barat).⁷ Selain itu, keberadaan mereka (kelompok pekerja imigran) di Jerman dapat membantu perekonomian di negara asal para imigran yang mayoritas adalah negara berkembang. Sehingga, para “*pekerja tamu*” banyak yang memutuskan untuk menetap di Jerman. Oleh sebab itu, muncul konsep *politik multikulturalisme* di Jerman sebagai respon terhadap meningkatnya jumlah imigran di Jerman yang diwujudkan melalui upaya integrasi. Upaya tersebut menawarkan para imigran boleh mempertahankan cara hidup sesuai kultur asli mereka (termasuk bahasa dan pola hidup beragama), tetapi harus menyatakan kesetiaan kepada negara Jerman. Dua budaya yang berbeda diharapkan bisa hidup berdampingan secara damai dengan sendirinya. Pada kenyataannya, pemerintah Jerman mengharapkan para imigran tersebut melebur menjadi bagian dari bangsa Jerman. Hal tersebut dikarenakan para pekerja tamu yang asalnya dianggap hanya sebagai penduduk sementara telah menjadi penduduk tetap dengan keluarganya dan tidak jarang anak-anak (bahkan hingga cucu-cucu mereka). Pemerintah Jerman mengharapkan, kelompok imigran tersebut dapat berasimilasi dengan baik dan hanya mengenal Jerman sebagai tanah airnya. Peningkatan arus migrasi yang tajam, menjadi keran *multikulturalisme* di Jerman. Penerapan *multikulturalisme* di Jerman diharapkan pemerintah Jerman dapat menunjukkan bahwa Jerman semakin terbuka dengan keberagaman kelompok dan menghilangkan isu fasisme yang masih berkembang di lingkungan domestik Jerman. *Multikulturalisme* juga dapat mempermudah integrasi imigran dengan masyarakat asli Jerman.

⁷ Baiq Wardhani, *Nasionalisme dan Etnisitas di Eropa Kontemporer*, (Surabaya: Universitas Airlangga, Desember 2011) hal. 226

Dari peningkatan arus migrasi Jerman setiap tahunnya, terdapat dua kelompok imigran terbanyak di Jerman, yaitu imigran asal Turki dan para transmigran keturunan Jerman yang telah bermukim sejak beberapa generasi di negara-negara bekas Uni Soviet, di Rumania dan di Polandia dan kemudian kembali ke Jerman.⁸ Dengan adanya kedua kelompok pendatang itu, angka arus imigrasi perkapita di Jerman pada tahun 1980-an bahkan jauh lebih tinggi daripada angka tersebut di negara-negara imigrasi klasik seperti Amerika Serikat, Kanada atau Australia. Dari data yang di peroleh, lebih dari 15 juta orang dengan apa yang disebut “latar belakang imigrasi“ yang tinggal di Jerman. Menurut definisi Badan Statistik Federal, kelompok itu mencakup semua orang yang bermigrasi di Jerman, serta orang yang lahir di Jerman dari orang tua yang paling sedikit satu orangnya adalah imigran. Sekitar 7 juta orang di antara mereka adalah warga negara asing, dan 8 juta orang telah memperoleh kewarganegaraan Jerman atau melalui naturalisasi, atau karena mereka tergolong ke-4 juta transmigran keturunan Jerman.⁹

Imigran Turki merupakan kelompok imigran yang paling banyak di Jerman. Menurut data yang diperoleh, Jerman memiliki hampir empat juta jiwa populasi Muslim dan 2.5 juta dari jumlah populasi Muslim tersebut merupakan

⁸ *Fakta mengenai Jerman-Migrasi dan Integrasi*, diakses 11 Oktober 2014 pukul 16.10 WIB, dari: <http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/id/masyarakat/main-content-08/migrasi-dan-integrasi.html>

⁹ *Ibid*

imigran keturunan Turki.¹⁰ Sejak tahun 1961 imigran dari Turki mulai masuk ke Jerman dikarenakan kebutuhan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja dan tenaga ahli di Jerman cukup tinggi.¹¹ Dilihat dari pengalaman sejarah Jerman, kekurangan sumber daya manusia di Jerman dilatar belakangi oleh keterlibatan Jerman berturut-turut dalam Perang Dunia dan juga peristiwa *Holocaust* yang terjadi di Jerman pada masa pemerintahan Adolf Hitler. Oleh karena itu, pada tahun 1961 para imigran tersebut datang ke Jerman atas undangan Jerman sebagai pekerja tamu dan diharapkan mendorong proses industrialisasi Jerman yang tengah berkembang pada saat itu.

Keberadaan imigran dalam jumlah besar tersebut menjadi permasalahan tersendiri di Jerman sebab banyak imigran merupakan tenaga tidak terampil, karena Jerman mengundang “*pekerja tamu*” untuk pekerjaan sederhana dengan upah murah. Sehingga terdapat kesulitan-kesulitan bagi kelompok imigran untuk dapat berintegrasi dengan pola kehidupan di Jerman. Dalam dua dasawarsa terakhir dari kedatangan para imigran di Jerman, hanya tercapai dua kemajuan dalam hal integrasi yaitu kewarganegaraan Jerman dapat diperoleh dengan lebih mudah, kontak antara para migran dan masyarakat Jerman digiatkan, dan sikap menerima keanekaan etno-budaya telah meningkat

¹⁰ *Angela Merkel Multikulturalisme di Jerman telah gagal*, diakses 07 Agustus 2014 pukul 09.51, dari: <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/10/10/18/140864-angela-merkel-multikulturalisme-jerman-telah-gagal>

Lihat

Multikultural Jerman gagal, *Upaya membangun sebuah masyarakat yang multikultural di Jerman dinyatakan “sama sekali gagal”* oleh Kanselir Jerman Angela Merkel, Diunduh 07 Agustus 2014, dari;

http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2010/10/101017_germanymultikultural.shtml

¹¹ *History of the Guest Workers-Immigration of Foreign Workers*. Diunduh, 12 Oktober 2014 pukul 18.47, dari;

http://www.germany.info/Vertretung/usa/en/04_Welt/G/02/03/Feature_3.html.

Kemajuan itu semakin diperkuat dengan ditetapkannya Undang-Undang Urusan Migrasi yang mulai berlaku pada tahun 2005 pada masa pemerintahan Angela Merkel. Tidak hanya itu, Angela Merkel juga memberikan respon yang signifikan terkait permasalahan integrasi dengan imigran. Realisasi dari respon Angela Merkel terhadap permasalahan imigran adalah “*Rencana Integrasi Nasional*” di tahun 2007. Rencana tersebut diperiksa secara teratur setiap tahunnya dengan mengadakan konferensi bersama wakil semua kelompok masyarakat yang terkait dan organisasi-organisasi kaum imigran. Sasaran utama dari rencana integrasi tersebut adalah integrasi ke dalam pasaran kerja melalui pendidikan dan peningkatan kemampuan bahasa Jerman.¹² Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Jerman untuk mengintegrasikan imigran dengan masyarakat asli Jerman tidak dapat berjalan dengan baik bagi kelompok imigran dan keturunannya, terutama kelompok imigran Turki. Secara perlahan timbul keresahan-keresahan tersendiri bagi masyarakat asli Jerman terhadap keberadaan kelompok imigran terutama kelompok imigran Turki dan keturunannya. Pernyataan kanselir *Angela Merkel* pada 16 Oktober 2010 mendukung pernyataan bahwa Jerman telah gagal dalam multikulturalisme. Dikutip dalam pidatonya di Postdam kepada kaum muda partai konservatif pimpinannya Serikat Kristen Demokrat atau Partai CDU, sebagai berikut:

¹² *Fakta mengenai Jerman-Migrasi dan Integrasi*, diakses 11 Oktober 2014 pukul 16.10, dari: <http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/id/masyarakat/main-content-08/migrasi-dan-integrasi.html>

“Diawal tahun 60-an, negara kita memanggil para pekerja asing untuk datang ke Jerman dan sekarang mereka telah tinggal di negara kita, kita mempercayai kalau mereka tidak akan tinggal dan pergi pada satu waktu, tetapi kenyataannya tidak begitu. Dan tentu saja, upaya untuk membangun sebuah masyarakat multikultural dan hidup berdampingan...telah gagal, sama sekali gagal”¹³

Sehingga, pada akhirnya persoalan *multikulturalisme dan integrasi* menjadi perdebatan dalam negeri Jerman.

Dari karakteristiknya, Jerman adalah salah satu bangsa Eropa yang memiliki karakteristik khusus dimana pengalaman perang dan peristiwa jaman Nazi membentuk masyarakat Jerman menjadi bangsa yang sangat cinta damai. Oleh karena itu, masalah integrasi antara masyarakat Jerman dan imigran Turki sangat menarik dilihat Jerman memiliki pengalaman sejarah tersendiri terkait isu rasisme dan karakteristik bangsa unik yang sangat cinta damai serta memiliki pengaruh yang cukup besar bagi integrasi Uni Eropa dimana Jerman menjadi kelompok negara pelopor terbentuknya Uni Eropa serta negara yang hingga pada tahun 2014 mendukung integrasi Eropa ditengah maraknya *Euroseptic* serta isu *Xenophobia* di kawasan Eropa Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

“Mengapa *politik multikulturalisme* tidak berhasil di Jerman?”

¹³ Bbc.co.uk, *Multikultural Jerman Gagal*, diakses pada tanggal 02 Maret 2015 pukul 14.08 dari: http://www.bbc.co.uk/indonesia/ig/dunia/2010/10/101017_germany_multikultural.shtml

C. Tujuan Penelitian

Melalui penulisan skripsi beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, sebagai berikut:

1. Mengetahui pokok-pokok permasalahan yang dihadapi imigran dan orang asli Jerman terkait upaya integrasi yang dilakukan pemerintah Jerman.
2. Mengetahui faktor-faktor pendorong kemunculan dan menguatnya gerakan anti-imigran di Jerman pada masa pemerintahan Angela Merkel.
3. Berkontribusi dalam kajian hubungan internasional terkait masalah imigran di negara-negara maju sebagai upaya perlindungan hak-hak minoritas di negara liberal.
4. Mengetahui efektivitas upaya integrasi imigran dengan orang asli Jerman yang dilakukan oleh pemerintah Jerman.
5. Memperkaya kajian Ilmu Hubungan Internasional mengenai permasalahan di kawasan Uni Eropa (HI).

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam membahas permasalahan penelitian sangat diperlukan. Teori maupun konsep yang digunakan dalam suatu penelitian merupakan jembatan yang akan menghubungkan antara rumusan masalah dengan hipotesa. Dikarenakan teori merupakan generalisasi abstrak mengenai beberapa fenomena, yang dalam menyusun generalisasinya, teori selalu memakai konsep-konsep yang lahir dari pikiran manusia. Oleh karena itu, teori memiliki sifat yang abstrak, sekalipun fakta-fakta dapat dipakai atau digunakan

sebagai sarana untuk memahami fenomena atau permasalahan yang ada. Pada penelitian ini akan digunakan konsep politik multikulturalisme.

Konsep Politik Multikulturalisme

Multikulturalisme adalah aliran atau paham tentang banyak budaya yang mengarah pada keberagaman budaya. Dalam menjelaskan mengenai nilai-nilai multikultural yang ada, terdapat beberapa indikator sebagai berikut; belajar hidup dalam perbedaan, membangun saling percaya (*mutual trust*), memelihara saling pengertian (*mutual understanding*), menjunjung sikap saling menghargai (*mutual respect*), terbuka dalam berpikir, apresiasi dan interdependensi, resolusi konflik, dan rekonsiliasi nir-kekerasaan.¹⁴ Menurut H.A.R Tilaar, multikulturalisme merupakan institusionalisasi dari keanekaragaman kebudayaan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok etnis di dalam suatu *nation-state* melalui bidang atau sistem hukum, pendidikan, kebijakan pemerintah dalam kesehatan dan perumahan, bahasa, praktik-praktik keagamaan dan bidang lainnya.¹⁵

Sedangkan *politik multikulturalisme* adalah politik tentang hak-hak minoritas. Politik multikulturalisme mendorong negara liberal untuk memperluas respek terhadap otonomi kultural bangsa lain di luar negeri ke dalam negerinya dalam bentuk pengakuan hak-hak kelompok minoritas. Salah tokoh dalam kajian multikulturalisme terkait hak-hak minoritas dalam teori-

¹⁴ Zakiyatun Baidhaw, *Building Harmony and Peace Through Multiculturalist Theology*, (British Journal of religious Education, Vol 29. No.1, 2007), hal-77 s/d 97

¹⁵ H.A.R Tilaar, *Multikulturalisme : Tantangan-tantangan global masa depan dalam transformasi pendidikan nasional*, (Jakarta : Grasindo, 2004), hal.387

teori liberal adalah *Will Kymlicka*. Menurutnya, subjek hak dalam pendekatannya melalui teori liberal adalah bukan individu melainkan *subjek kolektif* atau kelompok. Dan subjek kolektif tersebut dibedakan menjadi tiga yaitu :

1. “Gerakan-gerakan sosial baru” yaitu gerakan kaum homoseksual, kaum miskin kota, kaum cacat atau feminisme.
2. “Minoritas nasional” yaitu kelompok-kelompok masyarakat yang potensial dapat memerintah sendiri, tetapi diintegrasikan ke dalam sebuah negara yang lebih luas, seperti penduduk berbahasa Perancis di Quebec-Kanada.
3. Kelompok-kelompok etnis yaitu para imigran yang meninggalkan komunitas nasionalnya untuk masuk ke dalam masyarakat lain, misalnya orang Turki di Jerman.

Ketiga subjek itu memiliki masing-masing tiga macam *hak kolektif*, yakni hak-hak perwakilan khusus, hak-hak untuk memerintah sendiri dan hak polietnis.¹⁶

Istilah “multikultural” mencakup berbagai bentuk pluralisme budaya yang berbeda. Keberagaman tersebut memiliki dua pola besar yaitu, keragaman budaya timbul dari masuknya ke dalam negara yang lebih besar, budaya-budaya yang berkuasa sebelumnya, terkonsentrasi secara teritorial yang disebut negara *multi-bangsa* dan yang kedua yaitu keragaman budaya timbul dari imigrasi perorangan atau keluarga yang disebut negara *polietnis*. Para imigran

¹⁶ Will Kymlicka, *Kewargaan Multikultural*. (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2002), hal. xxi

pada kategori kedua itu bergabung ke dalam suatu perkumpulan lepas yang disebut kelompok etnis. Mereka berintegrasi ke dalam masyarakat yang lebih besar dan diterima sebagai anggota penuh masyarakat tersebut. Sementara mereka sering mencari pengakuan yang lebih besar atas identitas etnis mereka, tujuan mereka bukan untuk menjadi bangsa terpisah dan mempunyai pemerintah sendiri di sisi masyarakat yang lebih besar, melainkan mengubah institusi dan undang-undang masyarakat dominan untuk menjadikannya lebih menerima perbedaan kebudayaan.¹⁷

Dalam kajiannya mengenai politik multikulturalisme, *Kymlicka* berpendapat bahwa minoritas bangsa tidak berbicara mengenai kelompok ras atau keturunan, melainkan mengenai kelompok kebudayaan.¹⁸ Oleh karena itu, subjek hak dalam pendekatannya bukan perorangan melainkan kolektivitas. Menurutnya, hak kolektif adalah hak yang dijalankan oleh kolektivitas, bertentangan dengan hak yang dijalankan oleh perorangan.¹⁹ Sehingga terdapat tiga hak spesifik kelompok dalam politik multikulturalisme yaitu:

1. Hak atas pemerintahan sendiri. Di kebanyakan negara multibangsa, unsur bangsa cenderung menuntut bentuk otonomi politik atau yuridiksi wilayah, agar dapat memastikan pengembangan yang bebas dan penuh dari kebudayaan mereka dan kepentingan rakyatnya. Pada tingkat ekstrem, bangsa dapat menginginkan melepaskan diri, apabila mereka berpikir bahwa penentuan nasib sendiri itu tidak mungkin di dalam negara yang lebih besar.

¹⁷ *Ibid*, hal.14

¹⁸ *Ibid*,hal 33

¹⁹ *Ibid*, hal 51

2. Hak-hak polietnis. Dalam tiga puluh tahun terakhir ini, kelompok imigran telah berhasil menantang model 'konformitas Inggris' yang menerima bahwa mereka harus meninggalkan semua aspek warisan etnis mereka dan berasimilasi pada norma-norma dan adat istiadat kebudayaan yang ada. Pada awalnya tantangan itu hanya berbentuk tuntutan hak untuk menyatakan secara bebas kekhasan mereka tanpa takut akan prasangka atau diskriminasi dalam masyarakat dominan.
3. Hak perwakilan khusus. Sementara kepedulian tradisional para minoritas bangsa dan kelompok etnis adalah untuk pemerintahan sendiri atau hak polietnis, kini tampak semakin meningkat perhatian kelompok-kelompok itu, dan juga kelompok sosial non-etnis lainnya, pada gagasan atas hak perwakilan khusus.²⁰

Dari tiga bentuk hak-hak kelompok yang dibedakan diatas, Kymlicka juga memberikan dua garis besar mengenai tuntutan atas hak-hak kolektif yang diajukan oleh suatu kelompok etnis atau bangsa. Yang pertama menyangkut tuntutan suatu kelompok terhadap anggotanya sendiri dan yang kedua terhadap yang lebih besar. Kedua macam tuntutan itu, disebut yang pertama 'pembatasan internal' dan yang kedua 'perlindungan eksternal'. Pembatasan internal menyangkut hubungan di dalam kelompok-kelompok etnis atau kelompok bangsa dapat mencari penggunaan kekuasaan negara untuk membatasi kebebasan kelompoknya sendiri atas nama solidaritas kelompok. Perlindungan eksternal mencakup hubungan *antar kelompok* yakni kelompok

²⁰ *Ibid*, hal.40 s/d 47

etnis atau nasional dapat meminta untuk melindungi keberadaan dan identitasnya yang berbeda itu dengan membatasi dampak keputusan yang diambil oleh masyarakat yang lebih luas.²¹ Dalam politik multikulturalisme unsur-unsur dari hak kolektif tersebut menjadi bagian terpenting dalam penerapannya terhadap kewarganegaraan multikultural.

Konsep politik multikulturalisme menjadi acuan dalam melihat penerapan kebijakan integrasi antara masyarakat asli Jerman dengan kelompok imigran. Konsep ini menjadi gambaran kondisi ideal dalam kewarganegaraan multikultural di Jerman, dilihat bahwa Jerman merupakan negara dengan keberagaman tipe kedua yaitu negara polietnis. Pada akhirnya, melalui konsep ini memberikan saran kebijakan yang tepat dalam mengintegrasikan masyarakat Jerman dengan para imigran Turki.

E. Hipotesa

Sesuai dengan pokok permasalahan di atas, maka dapat dikemukakan hipotesa sebagai berikut : kegagalan multikulturalisme di Republik Federal Jerman pada masa pemerintahan Angela Merkel disebabkan oleh tidak terpenuhinya dua unsur dari hak minoritas dalam penerapan politik multikulturalisme di Jerman untuk masyarakat keturunan imigran Turki yaitu:

1. Hak polietnis berupa pembatasan keberadaan identitas yang berbeda dari masyarakat yang lebih luas.
2. Hak perwakilan khusus berupa pengakuan dan partisipasi dalam pemerintahan di Jerman.

²¹ *Ibid*, hal 52 s/d 53

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis permasalahan yang dirumuskan. Sehingga peneliti membatasi penelitian yang akan diteliti. Peneliti mengarahkan penelitian ini pada kasus kegagalan integrasi masyarakat Jerman dengan imigran Turki pada tahun 2010 sampai dengan 2014. Namun, tidak menutup kemungkinan peneliti menggunakan data dan fakta sebelum tahun 2010 sebagai unit eksplanasi yang memperkuat analisis, terutama dalam melihat kasus disintegrasi antara imigran dan masyarakat Jerman.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah telaah pustaka (*library research*) yaitu data penelitian yang didapat dari beberapa sumber dalam hal ini diwakili oleh informasi-informasi dari literatur-literatur yang relevan seperti buku, majalah, surat kabar, dan data elektronik (internet) yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan dilakukan dengan cara menghimpun data sekunder. Data-data yang didapat dari berbagai sumber tersebut akan digunakan sebagai bahan untuk membantu menganalisa fenomena yang akan dibahas dalam penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan skripsi ini dipaparkan sebagai berikut:

BAB I : Bab ini berisi tentang pendahuluan. Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesa,

jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab dua membahas tentang sejarah masuknya dan dinamika imigran di Jerman sebelum masa pemerintahan Angela Merkel dan pada saat masa pemerintahan kanselir Angela Merkel, upaya-upaya integrasi masyarakat keturunan imigran Turki dengan masyarakat asli yang dilakukan pemerintah Jerman serta perbedaan pola nilai-nilai yang dianut masyarakat Jerman dengan masyarakat keturunan imigran Turki dari segi budaya, sosial, hukum, dan kegiatan ekonomi.

BAB III : Bab tiga membahas mengenai analisis kebijakan multikulturalisme di Jerman dari awal masuknya kelompok imigran hingga meningkat sampai pada masa kanselir Angela Merkel.

BAB IV : Bab empat membahas tentang faktor-faktor penyebab kegagalan multikulturalisme di Jerman serta dampak kegagalan multikulturalisme tersebut bagi integrasi dan lingkungan domestik Jerman.

BAB V : Bab lima berisi kesimpulan, yang menguraikan kesimpulan atas penyebab kegagalan multikulturalisme di Jerman pada masa pemerintahan kanselir Angela Merkel.